

**PENGARUH KUALITAS KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, DAN INDEPENDENSI AUDITOR
TERHADAP PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL**

DIANDRA PUTRI SETIANI

8335132481



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

**THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE QUALITY,
INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND AUDITOR'S
INDEPENDENCE ON INTERNAL CONTROL DISCLOSURE**

DIANDRA PUTRI SETIANI

8335132481



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economic Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

DIANDRA PUTRI SETIANI. Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan public kepada para penanam modalnya adalah melakukan pengungkapan pada operasi perusahaan, salah satunya pada Pengendalian Internal. Namun, pengungkapan ini masih sedikit dilakukan oleh perusahaan karena regulasi yang mengikat belum kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dengan keahlian, rasio kepemilikan institusional, dan jumlah anggota auditor internal perusahaan terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for the Sosial Science* (SPSS) versi 24 dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear. Hasil dan simpulan penelitian menyatakan bahwa kualitas komite audit dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia (BEI), Pengungkapan Pengendalian Internal, Kualitas Komite Audit, Independensi Auditor

ABSTRACT

DIANDRA PUTRI SETIANI. *The Influence of Audit Committee Quality, Institutional Ownership, and Auditor's Independence On Internal Control Disclosure. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017*

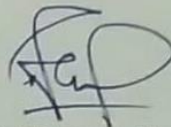
One thing that a public company have to do is disclosing their operational activity to their investors. That disclosure including internal control disclosure which showed the activity of company's internal control. However, the disclosure of Internal Control is still a bit carried out by companies because of regulations that binds not strong. This research aims to test the influence of audit committee quality, the ratio of institutional ownership, and the number of icompany internal auditor members against the disclosure of internal control,

The population of this research is manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (IDX) during 2014-2015. The sample is collected by using purposive sampling tehnik. Data is processed with the help of statistical package program for the social science 24 (SPSS 24) with descriptive statistic analysis and linear regression .The results of research stated that the quality of audit committee and institutional ownership will not affect the disclosure of internal control.

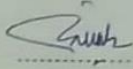
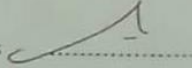
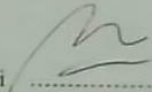
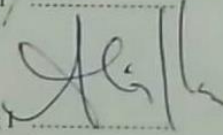

Keyword : *Indonesia Stock Exchange (IDX), Internal Control Disclosure, Audit Committee Quality, Institutional Ownership, Auditor's Independence.*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, ES., M. Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
<u>Diah Armeliza, SE, M.Ak</u> NIP. 19790429 200501 2 001	Ketua Penguji		26 Juli 2017
<u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 2008012 1 001	Sekretaris		20 Juli 2017
<u>Ratna Anggraini ZR, SE, M.Si, Ak, CA</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Penguji Ahli		1 Agustus 2017
<u>Marsellisa Nindito, SE, M.Sc, Ak, CA</u> NIP. 19750630 200501 2 001	Pembimbing I		27 Juli 2017
<u>Adam Zakaria, SE, Akt., M.Si, Ph.D</u> NIP. 19750421 200801 1 011	Pembimbing II		1/8/17

Tanggal Lulus: 17 Juli 2017

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah diublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Diandra Putri Setiani

No. Reg 8335132481

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan akan kehadiran Allah SWT yang dengan kasih sayang-Nya selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KUALITAS KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL”**. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Kekasih Allah yang telah membawa kita ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, Bapak, Faiz dan keluarga besar, atas segala doa yang telah dipanjatkan dan segala dukungan yang telah diberikan;
2. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ;
3. Ibu Marsellisa Nindito dan Bapak Adam Zakaria selaku dosen pembimbing atas arahan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi;

4. Keluarga Aktif, 2020, Ha-Te 2.0, Pi-aR, Kaderisasi, Sandya Sadajiwa, Akuntansi B 2013, Keluarga Samudra, dan Kominfo BEM UNJ 2017 atas semua tawa, canda, dan kenangan yang ditorehkan di empat tahun kebelakang serta dukungan dan doa yang tak putus selama penyusunan skripsi;
5. Sahabat-sahabat Penulis; Amanda, Syarifah, Nadiyya, Syarah, Okfa, Elvira, Savira, Amanda; yang selalu bersedia mendengarkan keluhan dan terus memberikan semangat.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunannya, skripsi ini mengandung kekurangan karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif terhadap masyarakat umumnya.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II.....	13
KAJIAN TEORETIK.....	13
A. Deskripsi Konseptual.....	13
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	14
3. Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX-2002).....	16
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal.....	16
5. Pengendalian Internal.....	18
6. Independensi Auditor.....	27
7. Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	29
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	41
C. Kerangka Teoritik.....	46
D. Perumusan Hipotesis Penelitian.....	49

BAB III.....	53
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Tujuan Penelitian	53
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	53
C. Metode Penelitian	54
D. Populasi dan Sampel	54
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	55
F. Teknis Analisis Data	60
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Deskripsi Data.....	66
1. Hasil Pemilihan Sampel	66
B. Pengujian Hipotesis	68
1. Uji Statistik Deskriptif	68
2. Uji Asumsi Klasik	73
3. Regresi Linear Berganda.....	78
4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	80
5. Uji Statistik F	83
6. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	84
C. Pembahasan.....	85
BAB V.....	92
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Implikasi	93
C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	48
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Hasil Penelitian Yang Relevan	41
Tabel IV.1 Hasil Pemilihan Sampel	67
Tabel IV.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	69
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas	74
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikoleniaritas	75
Tabel IV.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel IV.6 Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel IV.7 Hasil Uji Regresi Berganda	78
Tabel IV.8 Hasil Uji Statistik t	81
Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik F	83
Tabel IV.10 Hasil Uji Determinasi R^2	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Daftar Sampel Perusahaan	101
Lampiran 2 – Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia.....	103
Lampiran 3 – Kualitas Komite Audit	106
Lampiran 4 – Kepemilikan Institusional	109
Lampiran 5 – Jumlah Auditor Internal	113
Lampiran 6 – Pengungkapan Tugas Komite Audit PT Chandra Asri Petrochemical tbk.....	116
Lampiran 7 – Pengungkapan Tugas & Tanggung Jawab Unit Audit Internal PT Akasha Wira International Tbk	117
Lampiran 8 – Tabel Durbin-Watson.....	119
Lampiran 9 – Tabel t	120
Lampiran 10 – Kartu Konsultasi Pembimbingan Skripsi.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu cara mendapatkan modal untuk kelangsungan hidup usaha adalah dengan mencari investor untuk menanamkan modal. Perusahaan yang memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000 atau memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham disebut sebagai perusahaan publik (ojk.go.id). Dalam menjalankan kegiatan operasi, perusahaan publik berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan operasional perusahaan kepada para pemegang saham. Salah satu hal penting yang harus diungkapkan oleh perusahaan publik adalah keadaan dari lingkungan pengendalian internalnya.

Pada awal keberadaannya, perusahaan publik hanya wajib melaporkan laporan keuangannya saja. Namun, sejak terkuaknya kasus besar Enron dan beberapa perusahaan besar lainnya yang melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam jajaran Big 5, Arthur Andersen, perusahaan publik kini wajib untuk mengungkapkan serta keadaan lingkungan pengendalian internalnya. Kewajiban ini dituangkan dalam *Sarbanes Oxley Acts* (SOX) yang dikeluarkan pada tahun 2002. Terdapat dua bagian SOX yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan pengendalian internalnya, yaitu bagian 302 dan bagian 404. Bagian 302 mewajibkan *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) untuk

mengungkapkan seluruh kelemahan material yang terdapat dalam pengendalian internal, saat mereka melaporkan laporan keuangan periodik, kuartal, maupun tahunan. Sedangkan bagian 404, yang berlaku dua tahun setelah SOX rilis, mewajibkan adanya audit tahunan untuk melakukan review dan evaluasi atas manajemen pengendalian internal yang harus dilakukan oleh KAP yang melakukan proses audit perusahaan pada tahun tersebut.

Khanet *al* (2013) dalam Nabor, Maria KL dan Suardana, Ketut Ali (2014) menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam *annual report* yang dipublikasikan terdiri dari laporan tahunan dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam pengimplementasiannya di Indonesia, pengungkapan pengendalian internal terbagi menjadi dua golongan. Pada perusahaan perbankan, pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan wajib, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/2012 tentang transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Sedangkan untuk perusahaan non-bank, pengungkapan ini belum diatur secara khusus didalam peraturan sehingga masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Item-item dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tahun 2012, Kep-431/Bl/2012 No.X.K.6. Keputusan diatas merupakan pembaruan dari keputusan ketua Bapepam KEP-431/BL/2006. Salah satu hal yang diperbarui adalah pada pasal 2 huruf G nomor 7 terkait penyampaian laporan tahunan

perusahaan publik yang mengungkapkan implementasi *corporate governance* dan menguraikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan-ketentuan tentang pengungkapan tersebut merupakan upaya untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi.

Hasil survei yang dilakukan oleh PwC dalam 2014 *Global Economic Crime Survey* (vivanews.com) yang melibatkan 5.128 responden dari 98 negara yang berbeda, ditemukan bahwa 55% kejahatan ekonomi ditemukan melalui proses pengendalian perusahaan seperti pelaporan transaksi mencurigakan, audit internal, atau pengelolaan resiko penipuan. Survei tersebut menghasilkan data berupa 56% dari pelaku kejahatan berasal dari lingkungan internal perusahaan dimana seperlima dari mereka merupakan anggota senior manajemen, kemudian diikuti oleh pegawai menengah, dan sisanya staf junior.

Salah satu kasus yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal pernah terjadi di Indonesia dimana Bapepam memberikan sanksi administratif kepada Direksi Bank Lippo Tbk berupa penyerahan uang sebesar Rp 2.500.000.000 ke kas negara karena telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pihak manajemen Bank Lippo Tbk terbukti menerbitkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor. Auditor eksternal Bank Lippo, Ernst & Young, menyatakan bahwa mereka mengaudit satu laporan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan menjelaskan bahwa laporan keuangan hasil audit Ernst & Young berbeda dengan laporan konsolidasi yang diterbitkan oleh pihak Bank Lippo. Sehingga terdapat ketidakcocokan antara informasi yang diberikan oleh pihak manajemen dengan pihak

auditor. Bapepam menyatakan bahwa manajemen Bank Lippo Tbk, dalam memberikan keterangan melalui laporan keuangan per 30 September 2002 yang diterbitkan ke publik, telah melakukan tindakan penyesatan informasi publik.

Syarif *et al* (2015) dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia belum sepenuhnya merespon peraturan Bapepam-LK dengan ditemukan hanya 3 dari 55 perusahaan yang mengungkapkan item-item pengendalian internal secara lengkap. Survei tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh KAP dan konsultasi RSM AAJ pada 2015 membuktikan bahwa masih banyak pemilik perusahaan yang tidak memprioritaskan adanya Sistem Pengendalian Internal. McMullen dalam Xi, Zhao dan Jun, Guo (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang bermasalah cenderung untuk tidak melaporkan pengendalian internalnya. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah cenderung memiliki kualitas laba yang rendah pula (Doyle *et al*, 2007).

Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, perusahaan publik berpegang erat pada keberadaan investor di perusahaannya. Dalam mempertahankan kepercayaan para investor serta *stakeholder* lainnya, perusahaan harus mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penerapan *Corporate Governance*. Cara lainnya untuk memertahankan kepercayaan auditor adalah dengan pengendalian internal dan pengungkapan informasi yang baik. *Corporate Governance* serta pengendalian internal saling berhubungan erat dan kerap menjadi isu bisnis yang penting (Lulian dan Mihaela, 2012). Disebutkan pula apabila *corporate governance* dan pengendalian

internal sebuah perusahaan berjalan dengan efektif, maka kecurangan dan *error* dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan investor (Femiarti dan Dewayanto, 2012). Selain itu, menurut Khrisnan (2005), kualitas pengendalian internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas lingkungan pengendalian perusahaan termasuk dewan komisaris.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisari terdiri dari jajaran komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang optimum dinyatakan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil (Daton, 1999 dalam Zulfikar, 2015). Berikutnya, Qu (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pengungkapan informasi. Penelitian sebelumnya, yang menguji ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi menjumpai hasil yang beragam. Suhardjanto dan Afni (2009) menemukan pengaruh positif diantara keduanya, sedangkan penelitian Siagian dan Ghozali (2012) menghasilkan pengaruh negative diantara keduanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, agar tercipta hasil kerja yang efisien terutama dalam masalah pengawasan internal, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit. Tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pengawasan pada hal-hal yang berpotensi mengandung resiko pada sistem pengendalian internal serta melakukan

monitor pada proses pengawasan yang dilakukan oleh internal audit (FCGI, 2002) Dalam Y.Zhanget al (2007), Khrisnan (2005) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian perusahaan berada dibawah pengawasan komite audit perusahaan tersebut. Komite audit juga memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan (Carcello dan Neal, 2000). Tercapainya tujuan komite audit ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh komite audit. Penelitian Dewayanto, Totok (2015) menemukan bahwa kualitas komite audit perusahaan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012), ditemukan bahwa kualitas komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal perusahaan.

Selain meneliti kualitas, Dewayanto (2015) meneliti keberadaan direksi asing dalam jajaran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan direksi asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan direksi asing diperlukan karena dengan memiliki jaringan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman teknologi akan memberikan pandangan yang lebih luas dan bermanfaat bagi komite audit sehingga menguatkan pengungkapan pengendalian internal.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme *Corporate Governance* yang selanjutnya memengaruhi pengungkapan pengendalian

internal. Asbaugh *et al* (2007) beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan yang lebih terpusat memiliki pemicu yang lebih kuat untuk mendeteksi dan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal dalam tujuannya meningkatkan pengawasan dan ancaman litigasi dari pemegang saham mayoritas. Li dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) melakukan penelitian terhadap pengungkapan informasi dan kepemilikan manajerial dan menemukan bahwa terdapat pengaruh positif diantara keduanya. Namun, Eng dan Mak (2003), yang meneliti hal yang sama, menemukan pengaruh negative diantara keduanya. Para pemilik modal institusional yang memegang sebagian besar saham memiliki kemampuan lebih untuk mengawasi manajemen (Jensen, 1993 dalam Asbaugh *et al*, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Bogdan *et al* (2009) dan Rouf dan Al-Harun (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan informasi. Namun, Adani (2013) mengungkapkan hal sebaliknya dalam penelitiannya. Ia menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian Collet dan Dedman (2010) dan Mensah (2016).

Laporan keuangan yang dipublikasikan dan menjadi konsumsi public adalah laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi opini oleh auditor. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa fokus auditor dalam menjaga reputasinya dalam memberikan laporan audit yang berkualitas dapat menghindarkan mereka melakukan kegiatan yang dapat membahayakan tingkat independensinya. Doyle *et al* (2006)

menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal baik pada perusahaan kecil yang memiliki laba kecil maupun perusahaan besar dengan laba yang besar tidak ada bedanya. Dalam pemilihan auditor, biasanya pihak manajemen akan mengikuti saran dari para pemilik saham. Beberapa perusahaan dengan resiko rendah biasanya akan memilih auditor dari BIG 4 karena para pemilik saham beranggapan bahwa tingkat independensi BIG 4 lebih baik daripada non BIG 4. Namun, sebagian besar mereka juga menghindari BIG 4 karena mereka tahu bahwa KAP BIG 4 dapat sangat ketat dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan maupun kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Hasil penelitian Adani (2013) mengungkapkan bahwa independensi auditor memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pengendalian internal.

Kemudian, dalam usahanya untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, perusahaan akan secara signifikan meningkatkan biaya. Mereka akan membutuhkan biaya lebih untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efektif diantaranya untuk kebutuhan kompensasi. Shon dan Weiss (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan kompensasi untuk memotivasi manajer agar membuat sistem pengendalian internal yang efektif. Hasil penelitian Leng dan Ding (2011) dan Syarif (2015) menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal perusahaan berhubungan dengan kompensasi yang diterima oleh pada eksekutif. Sejalan dengan mereka, pada hasil analisis Balsam *et al* (2013) ditemukan hubungan yang sangat kuat antara pengungkapan wajib dengan kompensasi eksekutif, karena pengungkapan

wajib akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kontrol dan tanggung jawab mereka.

Penelitian yang membahas tentang pengungkapan pengendalian internal dan faktor-faktor yang memengaruhinya masih sangat minim dilakukan. Terutama di Indonesia yang belum memiliki peraturan yang membahas secara jelas tentang pengungkapan ini. Padahal pengungkapan pengendalian internal adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Penulis melakukan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa faktor yang ditemukan berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal. Faktor-faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kualitas Komite Audit yang mencerminkan organ *Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional yang menggambarkan mekanisme *Corporate Governance*, dan Independensi Auditor sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Belum ada regulasi yang kuat di Indonesia tentang kewajiban pengungkapan pengendalian internal.

2. Terdapat kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang merugikan tidak hanya perusahaan secara materiil, juga pihak eksternal sehingga perusahaan kehilangan kepercayaan investor dan kehilangan kesempatan pendanaan.
3. Masih sedikit perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap pengendalian internalnya.
4. Lemahnya pengendalian internal perusahaan memicu terjadinya berbagai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal manajemen.
5. Pengungkapan pengendalian internal oleh perusahaan manufaktur yang *Go Public* di Indonesia masih tergolong lemah.
6. Ukuran dewan komisaris yang belum optimal dapat memengaruhi transparansi pengungkapan informasi.
7. Komite audit yang kurang baik dari segi kualitas dapat memengaruhi tingkat pengungkapan pengendalin.
8. Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* menimbulkan *agency cost* yang tinggi dalam perannya memengaruhi pengungkapan pengendalian internal.
9. Masih ada auditor yang tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah ini membuat peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah Kualitas Komite Audit,

Kepemilikan Institusional dan Independensi Auditor terhadap pengungkapan pengendalian internal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi satu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?
3. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengungkapan pengendalian internal masih sedikit dilakukan di Indonesia dan masih menggunakan alat ukur dari COSO. Penulis mengangkat kembali tema ini untuk menambah bukti empiris serta menggunakan alat ukur yang sesuai dengan regulasi di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi para pembaca dengan cara mengembangkan teori mengenai pengungkapan pengendalian internal, sehingga dapat menambah referensi untuk penelitian berikutnya

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas komite audit, komposisi kepemilikan institusional, dan independensi auditornya terhadap pengungkapan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengendalian internal.
- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur implementasi peraturan yang sedang berjalan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan sinergi dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi dan pertama kali digunakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. *Agency theory* selama ini dijadikan sebagai pondasi dalam praktik bisnis yang ada. Prinsip utama dari *agency theory* adalah hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang (*agent*).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*). Teori ini memberikan pemahaman tentang aktivitas *principal* dengan pemberian wewenang tanggung jawab kepada manajemen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan memungkinkan munculnya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sebagai pengelola perusahaan. Hubungan ini memberikan potensi terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Agency theory berlandaskan pada tiga asumsi, yaitu asumsi mengenai manusia (*people*), organisasi (*organization*), dan informasi (*information*) (Eisenhardt, 1989). Mengenai hal ini, Arifin (2005) menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk

mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik yang timbul antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya *asymmetric information* antara *principal* dan *agent*. Asumsi tentang informasi, bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Asumsi-asumsi tersebut kemudian berakibat pada timbulnya asimetri informasi sedangkan asimetri informasi menyebabkan kebutuhan prinsipal akan informasi tidak terpenuhi.

Terdapat beberapa cara dalam menanggulangi masalah asimetri informasi, antara lain dengan melakukan kontrak yang optimal antara manajemen dengan investor, mengadakan dewan komisaris yang memiliki peran mengawasi perilaku manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemilik luar, dan memastikan adanya informasi yang efektif dari pihak perantara (Healy dan Palepu, 2001). Selain mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi, peningkatan pengawasan pemantauan oleh dewan komisaris dan komitenya dapat memengaruhi kinerja keuangan pula (Brick dan Chindhambaran, 2007).

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Jama'an (2008), *signaling theory* mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal berupa informasi atau promosi kepada pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut berupa hal apa saja yang sudah dilaksanakan oleh manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik modal. Sinyal

tersebut menyatakan bahwa kinerja perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Teori ini kemudian memberikan penjelasan bahwa manajer melakukan *signalling* untuk mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi, baik laporan keuangan maupun laporan lainnya yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Teori sinyal menunjukkan adanya keberadaan asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut serta mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan (Wolk et al, 2008).

Singnalling Theory menekankan pada pentingnya informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sebagai salah satu pertimbangan yang digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah unsur penting bagi pelaku bisnis dan investor karena memuat keterangan, catatan atau gambaran baik pada masa lalu maupun pada masa mendatang yang dapat memengaruhi tidak hanya kelangsungan hidup perusahaan namun juga keadaan pasarnya.

Ross (1977) beranggapan bahwa perusahaan akan dengan luas melakukan pengungkapan informasi tambahan (sukarela) karena teori sinyal. Dengan demikian, manajer dari perusahaan dengan kualitas yang lebih baik akan berusaha untuk membedakan mereka dengan perusahaan yang dengan kualitas lebih rendah.

3. Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX-2002)

Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX) adalah peraturan yang dicanangkan oleh Paul Sarbanes dan Michael Oxley sebagai salah satu dampak dari berbagai kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP BIG 5 di Amerika Serikat. Kasus-kasus tersebut menciptakan persepsi bahwa perusahaan public berkemungkinan melakukan kecurangan saat menjalankan kegiatan operasinya.

SOX 2002 juga dikenal sebagai *Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002* yang kemudian mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa saham Amerika untuk menaati sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memberikan jaminan tentang integritas laporan keuangan.

Aspek penting dari SOX 2002 adalah dua bagian khusus yang berfokus pada isu pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan, yaitu *Section 302* dan *Section 404*. Pada *Section 302*, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengungkapan pada evektifitas dan perubahan yang signifikan terkait dengan pengendalian internal. Sedangkan *Section 404* memfokuskan akan kewajiban perusahaan untuk menilai struktur dan prosedur pengendalian internal serta menyertakan opini auditor perusahaan terhadap penilaian yang dilakukan oleh manajemen.

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di pasar modal Indonesia. Walaupun kini kegiatan Bapepam sudah tidak lagi ada karena digantikan keberadaannya oleh Otoritas Jasa

Keuangan, namun beberapa regulasi yang pernah dibuat masih digunakan hingga kini.

Salah satunya adalah keputusan yang dikeluarkan pada Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu KEP-431/BL/2012. Penerbitan peraturan ini kemudian mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi.

Terdapat beberapa poin penting dalam perubahan peraturan ini, antara lain:

1. Kewajiban penyampaian laporan keuangan
2. Ketentuan umum dan ikhtisar data keuangan penting
3. Laporan dewan komisaris dan dewan direksi
4. Profil perusahaan
5. Analisis dan pembahasan manajemen
6. Tata kelola perusahaan

7. *Corporate Social Responsibility*
8. Laporan keuangan *audited*
9. Tanda tangan dewan komisaris dan direksi
10. Pemberlakuan peraturan.

5. Pengendalian Internal

International Standards on Auditing (ISA) dalam Tuanakotta (2015)

mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

“Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.”

Sedangkan pengendalian internal oleh SOX-2002 didefinisikan sebagai:

“Process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives”.

Kemudian, Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisika pengendalian internal sebagai:

“Sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah alat yang digunakan oleh manajer untuk membantu pencapaian tujuan usaha mereka dalam mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, mencapai kendalan dari laporan keuangan, dan melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku dan

dibutuhkan untuk mencapai kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dalam mencapai kepastian yang layak, pengendalian internal disesuaikan dengan kerangka COSO. Menurut kerangka COSO, terdapat lima tujuan dari pengendalian internal, yaitu:

1. Penilaian Risiko (*risk assessment*)

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya

2. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian internal adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, dan praktik kepersonaliaan.

3. Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Poin ini mengacu pada kebijakan dan prosedur yang membantu keyakinan bahwa peraturan telah dilaksanakan. Aktifitas pengendalian membantu meyakinkan manajemen bahwa tindakan yang perlu dilakukan telah diambil dan menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

5. Pengawasan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian internal. Namun auditor eksternal juga sering melakukan

penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan.

Pengungkapan pengendalian internal pada penelitian sebelumnya diukur dengan menggunakan *index*. *Index* ini digunakan sebelumnya oleh Coke (1992) dan Wallace (1987) dengan rumus:

$$Index = \frac{n}{k}$$

n = Jumlah item pengungkapan

k = jumlah seluruh item yang mungkin diungkapkan.

Peneliti sebelumnya menggunakan berbagai macam item untuk mengukur *index*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2015) menggunakan elemen COSO dengan menggunakan *Index* yang menyerupai ICRS (*Internal Control Reporting Score*) yang dikembangkan oleh Deumes (2005). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar *et al* (2015), item yang digunakan sebagai acuan adalah lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bank Umum. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2012) menggunakan acuan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat beberapa item pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten

atau Perusahaan Publik, poin g tentang Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

Item-item tersebut adalah:

- 1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
 - a) uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
- 2) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;
 - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;

- d) keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
 - e) pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);
- 3) Komite Audit, mencakup antara lain:
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan anggota Komite Audit;
 - e) pengungkapan independensi Komite Audit;
 - f) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
 - g) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain:
- a) nama;

- b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan anggota komite;
 - e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;
 - f) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan
 - h) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan sekretaris perusahaan;
 - e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;
- 6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;

- c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d) struktur dan kedudukan unit audit internal;
 - e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
 - f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan lainnya; dan
 - b) reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen;
- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;
 - b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
- a) pokok perkara/gugatan;
 - b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan
 - c) pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.

- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:
- a) pokok-pokok kode etik;
 - b) pokok-pokok budaya perusahaan (*corporate culture*);
 - c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - d) pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;
- 12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* (jika ada); dan
- 13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:
- a) cara penyampaian laporan pelanggaran;
 - b) perlindungan bagi pelapor;
 - c) penanganan pengaduan;
 - d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
 - e) hasil dari penanganan pengaduan.

Beberapa pengukuran Pengungkapan Pengendalian Internal yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya antara lain dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang berisi tentang pertanyaan terkait pencapaian pengendalian internal. Kemudian Dewayanto (2015) mengukur pengendalian internal dengan menggunakan index yang item-itemnya berasal dari COSO 1992. Penulis memutuskan untuk mengukur pengendalian internal dengan menggunakan index yang itemnya terdapat pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, poin-poin tentang Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) no 3, 6, 7, dan 8 sehingga terdapat total 18 jumlah item pengungkapan maksimal. Item ini dipilih berdasarkan saran dari Dewayanto (2005) untuk menggunakan regulasi yang berjalan di Indonesia agar tercermin keadaan nyata pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan di Indonesia.

6. Independensi Auditor

Independensi merupakan terjemahan kata *independence* yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun independen bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens et al (2008:111), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias.

Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Mautz dan Sharaf (1993) dalam bukunya menyatakan terdapat tiga komponen yang harus dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Tiga komponen itu adalah kompetensi, independensi, dan *due professional care*. Penting bagi auditor untuk mempertahankan perilaku yang independen dalam memenuhi tanggung jawab kepada klien. Namun yang juga penting adalah memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memercayai independensi tersebut.

Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi Perilaku Profesional, IESBA dalam Arens (2015) menyatakan bahwa terdapat dua aspek yang mencakup independensi akuntan publik, yaitu independensi dalam berpikir dan independensi penampilan. Independensi dalam pikiran mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias serta mensyaratkan anggota harus independen dalam fakta. Sedangkan independensi dalam penampilan adalah interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pengguna laporan keuangan yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, maka sebagian besar nilai auditor juga akan hilang.

Pengukuran independensi pada auditor dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain dengan menggunakan butir-butir pertanyaan seperti yang dilakukan oleh Adani (2013). Butir-butir pertanyaan yang diajukan antara lain terkait keobjektivitasan, keprofesionalan, serta ketidakberhikan auditor internal. Kemudian pada penelitiannya, Femiarti dan Dewayanto (2012) menggambarkan independensi

auditor dengan variabel *dummy* dimana skor 1 diberikan apabila Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh seorang *officer* dan skor 0 diberikan apabila Kepala Unit Audit Internal tidak dijabat oleh seorang *officer*. Posisi Kepala Unit Audit Internal sebagai *officer* memberikan gambaran bahwa ia akan memberikan dukungan lebih besar dari senior manajer maupun dewan, sehingga apabila dibutuhkan dalam mengambil keputusan dalam Unit Audit Interna akan lebih bebas dari sampur tangan (Lin *et al*, 2011). Sedangkan Sukiswo (2015) mengukur independensi auditor internal dengan jumlah anggota audit internal perusahaan. Jumlah audit internal perusahaan dapat menggambarkan independensinya karena semakin besar jumlah auditor internal perusahaan, maka tingkat ditemukannya kelemahan maupun kecurangan tinggi dan pendapat auditor yang beragam dapat meningkatkan keputusan independensinya.

Berdasarkan uraian diatas, pengukuran yang diadopsi penulis dalam penelitian ini adalah pengukuran yang dilakukan oleh Sukiswo (2015) yang menyatakan independensi auditor internal dengan jumlah anggota auditor internal pada perusahaan.

7. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

7.1. Definisi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Corporate Governanve didefinisikan oleh beberapa sumber, baik yang merupakan institusi maupun individu. Definisi *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation & Development* (OECD, 2004) adalah:

“One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a

company's management, its board, its shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance."

OECD mensyaratkan terdapat struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat memberikan rangsangan yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Good Corporate Governance* juga harus mampu menjadi jembatan untuk proses monitor yang efektif agar dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)

mendeskripsikan *corporate governance* sebagai:

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan."

Sedangkan definisi *Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebuah pilar dari sistem ekonomi pasar. Keberadaan pilar tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana usaha yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan pada perusahaan dan suasana usaha suatu negara. Pelaksanaan *Corporate Governance* juga diharapkan mampu mendorong penciptaan pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hastuti (2005), Shleifer and Vishny (1997) *corporate governance* dinyatakan berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporate Governance* adalah sebuah proses yang berlaku bagi seluruh lingkungan perusahaan dan dibuat untuk mewujudkan hak-hak dan memaparkan kewajiban para pemangku kepentingan untuk memberikan nilai lebih bagi mereka.

7.2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Penerapan *Corporate Governance* yang baik adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk mengimplementasikannya di perusahaan mereka. Dalam upayanya mewujudkan *Corporate Governance* yang baik, harus dipastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan seluruh aspek bisnis dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Corporate Governancenya*. Menurut KNKG, terdapat 5 prinsip *Corporate Governance*, yaitu:

a. Keterbukaan Informasi (*Transparancy*)

Keterbukaan informasi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materill dan relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses dan dipahami bagi pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam akuntabilitas, perusahaan harus mampu memertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka, pengelolaannya harus dilaksanakan dengan benar, terukur, serta sesuai dengan kepentingan stakeholder.

c. Responsibility (*Responsibility*)

Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan tanggung jawa kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar kesinambungan usaha dapat terpelihara dalam jangka panjang.

d. Independensi (*Independency*)

Independensi disini berarti bahwa pengelolaan perusahaan harus secara independen agar tiap-tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak saling mengintervensi.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini mewajibkan adanya perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang muncul berdasarkan pada perjanjian perundangan yang berlaku.

7.3. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja sebuah organisasi dalam melaksanakan sebuah tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Utama dan Utama (2003) dalam Yana (2011), mekanisme ialah suatu cara yang

dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agensi yang terjadi didalam perusahaan. Mekanisme Corporate Governance terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Mekanisme Internal

Mekanisme ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan konflik agensi dengan memanfaatkan pengendalian internal perusahaan. Salah satu jenis mekanisme tersebut adalah struktur kepemilikan.

Struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mekanisme Corporate Governance dan kinerja perusahaan (Scheilfer dan Vishny, 1996 dalam Maharani, 2012). Kemudian Zhao dan Guo (2013) mengungkapkan hasil penelitian mereka bahwa kinerja perusahaan dan pengungkapan pengendalian internal memiliki korelasi yang signifikan positif.

Struktur kepemilikan dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya:

1) Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa menurut teori keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan mengurangi konflik keagenan. Tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang melalui kepemilikan manajerial. Manajer juga akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan karena berkaitan dengan

kepentingannya sendiri sebagai pemegang saham, sehingga pengungkapan pengendalian internal akan semakin baik.

2) Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme dalam *Corporate Governance*. Dalam Tarjo (2008), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dalam rangka memonitor manajemen, kepemilikan institusional memiliki arti penting karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kegiatan monitoring ini tentunya akan menjamin para pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar di pasar modal.

Wicaksono (2013) mengatakan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mampu meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Didalam Tohir (2013), investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor individual. Kelebihan tersebut antara lain:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih untuk memperoleh informasi dibandingkan dengan investor individual

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi
3. Investor institusional memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Pada penelitian terdahulu, komponen kepemilikan institusional selalu diukur dengan menggunakan presentase kepemilikan institusional yang didapatkan dari data jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dalam perusahaan dan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran ini digunakan oleh Zulfikar *et al* (2015) dan Sukiswo (2015) sehingga pada penelitian ini, kepemilikan institusional akan diukur dengan presentasi kepemilikan saham institusional.

b. Mekanisme Eksternal

Mekanisme ini merupakan mekanisme pengendalian yang mengandalkan seluruh perangkat yang berada di luar perusahaan. meliputi keadaan ekonomi, hukum, dan social. Tujuannya adalah untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perangkat tersebut mencakup pasar uang dan pasar modal yang bersaing, perangkat hukum, dan perundang-undangan yang lengkap,

penerapan hukum yang konsisten dan adil, pasar barang dan jasa yang aktif dan terbuka, serta konsumen yang aktif, tanggap dan sadar akan hak dan kewajibannya (Purwatiningsih, 2000).

7.4. Organ Corporate Governance

Dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), organ GCG terdiri dari organ persero dan organ perum. Yang merupakan bagian dari organ persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan bagian dari organ perum adalah Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Penelitian ini menggunakan salah satu bagian dari organ persero sebagai salah satu variabelnya.

7.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris adalah hak untuk:

- a) Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris
- b) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

- c) Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit
- d) Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
- e) Mengubah anggaran dasar
- f) Membubarkan perseroan

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya atau yang dalam praktik biasanya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului oleh pemanggilan RUPS. Lebih lanjut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan berikut.

- a) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b) Dewan komisaris dan direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

7.4.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pimpinan di perusahaan, dan tingkat efektivitas dewan komisaris akan menentukan kesuksesan perusahaan (Seikh, Wang, dan Khan, 2013 dalam). Sebagai inti dari *corporate governance*, dewan komisaris memiliki tanggung jawab atas penegakan dan implementasi dari sistem pengendalian internal dan menjamin keandalan dari pengungkapan informasi (Leng dan Ding, 2011).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, keberadaan dewan komisari didukung oleh komite audit.

7.4.2.1. Komite Audit

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada peraturan No. IX 1.5 tentang Pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, komite audit dijelaskan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting dalam penerapan GCG adalah dengan adanya komite audit yang efektif karena keberadaan komite audit yang efektif adalah salah satu aspek dalam kriteria penilaian dalam menentukan baik atau tidaknya penerapan GCG perusahaan.

Dalam KEP-399/BEJ/07-2001, dijelaskan bahwa ukuran komite audit harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota, dengan salah satu diantaranya menjabat sebagai ketua komite audit dan anggota lainnya merupakan pihak independen yang salah

satunya harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

7.4.2.1.1. Keahlian Komite Audit

Security Exchange Commission (SEC) menjelaskan konsep ahli keuangan dengan pertanyaan “Apakah direktur telah memiliki pengalaman sebelumnya terkait akuntansi dengan pelaporan keuangan?”. SEC juga menyarankan direktur untuk harus memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, CFO, atau kontroler serta menambahkan beberapa unsur berikut dalam definisi pengalaman akuntansi: pengalaman mengawasi karyawan, tanggung jawab pelaporan keuangan, mengawasi kinerja perusahaan, dan pengalaman yang relevan lainnya.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 mensyaratkan anggota komite audit untuk memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Latar belakang tersebut dimaksudkan agar anggota audit memiliki pemahaman tentang konsep serta proses akuntansi sehingga dapat membantu dan anggota komite audit lainnya dalam mengidentifikasi dan penyelesaian masalah terkait. Hal ini bertujuan agar anggota komite audit dapat segera mengambil tindakan jika terdapat masalah dan agar mereka dapat mencegah terjadinya kemungkinan salah saji dalam pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan keahlian komite audit sebagai salah satu variabel penelitian antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2013), Femiarti dan Dewayanto (2012), Zhang *et al* (2007), dan Khrisnan (2005). Seluruh peneliti mengukur variabel ini dengan presentase jumlah komite audit perusahaan yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi (ACCT_ACFE).

$$ACCT_ACFE = \frac{\sum \text{Anggota Komite Audit berlatar belakang keahlian keuangan/akuntansi}}{\sum \text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

Pada penelitian ini, penulis mengukur keahlian komite audit dengan rumus diatas, yaitu membagi jumlah komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dengan total seluruh anggota audit.

7.4.3. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu Undang-undang Perseroan mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “fiduciary duty” yang mencakup juga “duty of skill and care” oleh direksi. Hal ini tampak

pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan Pada Prinsipnya, Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan pengendalian internal sebagai variable dependen (terikat) belumlah banyak, tetapi peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar dan acuan penelitian ini. Alasan digunakannya penelitian terdahulu adalah sebagai dasar acuan dan pendukung penelitian ini, karena penelitian terdahulu telah terbukti secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini. Penelitian yang akan dijelaskan dibawah ini adalah penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan pengendalian internal.

Tabel II.1

Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
Dewayanto,	Eksistensi Direksi Asing	Keahlian komite audit dan

Totok (2015)	Dalam Hubungan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal	keberadaan direksi asing mampu meningkatkan pengungkapan pengendalian internal yang diukur dengan <i>Internal Control Disclosure Index</i> menggunakan item-item yang berasal dari COSO.
Sjarief, Weli, dan Widyastuti (2015)	<i>The Internal Control Disclosure, The Excecutive Compensation, and The Timeless of Financial Reporting</i>	Terdapat hubungan antara pengungkapan pengendalian internal dengan tingkat kompensasi yang diterima oleh eksekutif dan waktu penerbitan laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kompensasi yang diterima leh eksekutif, maka semakin luas pengungkapan pengendalian internalnya.
Deumes, Rogier dan Knechel, W. Robert	<i>Economic Incentives for Voluntary Reporting in Internal Risk Management</i>	Keberadaan pengungkapan sukarela dari pengendalian internal berpengaruh secara

(2008)	<i>and Control System</i>	signifikan dengan indikasi informasi dan masalah keagenan
Sukiswo, Wahyu Helmi D (2015)	Pengaruh Independensi Auditor, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal	Hasil dari pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independensi auditor internal dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Khrisnan, Jayanti (2005)	<i>Audit Committee quality and Internal Control: An Empirical Analysis</i>	Adanya indikasi bahwa komite audit independen dan komite audit dengan keahlian keuangan cenderung dikaitkan dengan kejadian masalah pengendalian internal.
Agyei-Mensah,	<i>Internal Control</i>	Hasil menyatakan bahwa

Ben Kwane (2016)	<i>Information Disclosure And Corporate Governance: Evidence From An Emerging Market</i>	perusahaan yang melakukan pengungkapan pada pengendalian internalnya masih sangat sedikit. Keberadaan independensi dewan komisaris merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Li, Han (2015)	<i>Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence from China</i>	Terdapat hubungan antara keahlian manajerial dengan kualitas pengendalian internal perusahaan.
Yan Zhang et al (2007)	<i>Audit committee Quality, Auditor Independence, And Internal Control Weaknesses.</i>	Ada relasi antara kualitas komite audit, independensi auditor, dan kelemahan pengendalian internal. Perusahaan teridentifikasi memiliki kelemahan internal kontrol jika anggota komite audit sedikit memiliki keahlian akuntansi

		dan/atau keuangan.
Dominsoru, Sorinel (2009)	<i>Audit committee Quality, Auditor Independence, And Internal Control Weaknesses.</i>	Kualitas komite audit dan independensi auditor memiliki relasi dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Perusahaan cenderung memiliki kelemahan pada pengendalian internalnya apabila memiliki komite audit dengan keahlian keuangan/akuntansi lebih sedikit. Semakin independen auditor, semakin tinggi pula tingkat terdeteksinya kelemahan pengendalian perusahaan.
Zulfikar, Rosiana, dan Nariah, Ratu Ayu Fanisa (2015)	<i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan Pengendalian Internal	Penelitian menunjukkan bahwa Komposisi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Komite Audit tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian

		Internal. Sedangkan Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Latas Belakang Keuangan atau Pendidikan Akuntansi Komite Audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.
Adani, Yusrina (2013)	Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal	Independensi Auditor Internal dan Komite Audit memiliki hubungan dan pengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal baik masing-masing atau secara bersama-sama.

Data: Diolah oleh penulis (2017)

C. Kerangka Teoritik

Setelah terjadi berbagai masalah yang melibatkan berbagai perusahaan raksasa dunia dan salah satu KAP besar pada masanya, diterbitkanlah Sarbanes Oxley Acts pada tahun 2002. Penerbitan SOX 2002 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang kegiatan perusahaan kepada para pembaca informasi.

Di Indonesia sendiri, diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal, KEP-431/BL/2012 No.X.K.6 yang merupakan pembaruan peraturan sebelumnya. Pembaruan tersebut berisi tambahan tentang pengungkapan implementasi lingkungan *Corporate Governance* sehingga diharapkan dapat mencerminkan keadaan yang paling nyata dari perusahaan.

Sebagai perusahaan yang melantai di bursa saham, salah satu kewajiban utama manajemen kepada investor adalah melaporkan keadaan perusahaan. Saat ini, bukan hanya keadaan keuangan perusahaan yang menjadi pertimbangan investor menyimpan dana mereka, tetapi juga keadaan lingkungan pengendalian internalnya. Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian internal mampu memberikan gambaran tentang tidak hanya keadaan masa kini perusahaan, namun juga keadaan masa depan dan kontrol perusahaan terhadap kinerjanya. Ketiadaan pengungkapan pengendalian internal ini kemudian akan menyebabkan penerima informasi tidak dapat menerima seluruh hal yang relevan terkait dengan kegiatan perusahaan. Padahal, informasi adalah faktor yang sangat memengaruhi berbagai pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan pengendalian internal. Pengungkapan pengendalian internal adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kondisi pengendalian internal perusahaan. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor.

1. Hubungan antara Kualitas Komite Audit dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

Perusahaan dengan komite audit yang lebih berkualitas akan memiliki tingkat pengungkapan pengendalian internal yang lebih baik, hal ini dikarenakan komite audit secara langsung membawahi lingkungan pengendalian internal. Kualitas komite audit diukur dengan banyaknya jumlah mereka yang memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi. Sehingga, semakin banyak anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan, maka mereka akan makin mampu melakukan kontrol serta meningkatkan tingkat pengungkapan pengendalian internal.

2. Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham selain dari kepemilikan individu atau manajerial. Keberadaan pemilik institusional menjadi penting karena mereka dinilai dapat mengurangi *agency conflict* yang mungkin terjadi. Walaupun dalam mekanisme terdapat dua kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, namun kepemilikan institusional dinilai memiliki *agency cost* yang lebih besar sehingga akan lebih memengaruhi pengungkapan pengendalian internal perusahaan.

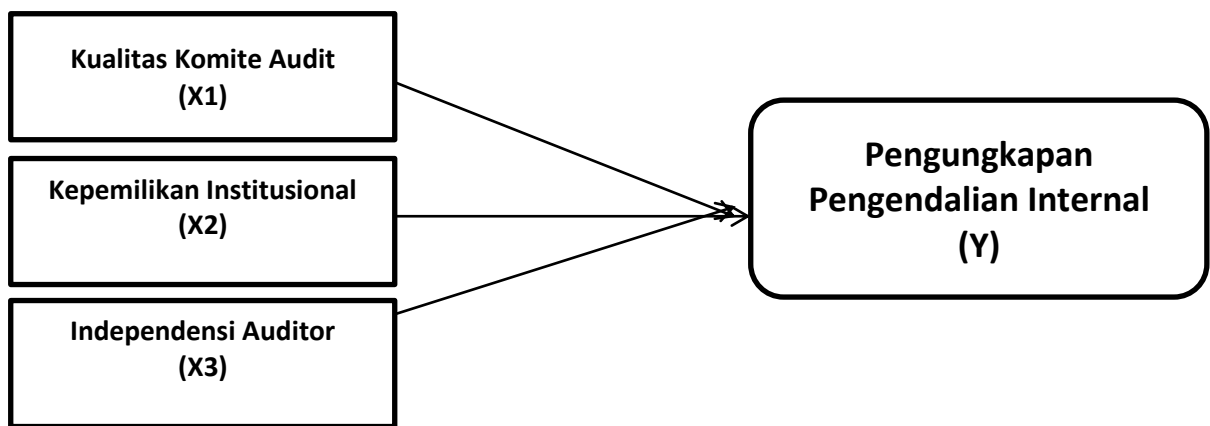
3. Hubungan antara Independensi Auditor dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

Independensi auditor adalah keadaan tidak memihak auditor pada suatu kepentingan. Auditor internal dikatakan independen apabila mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas serta objektif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat

independensi auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan pengendalian internalnya, karena independensi seorang auditor tercermin disana.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Konseptual



D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretik dan hasil dari penelitia-penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit didasarkan pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan akuntansi atau

keuangan komite audit dapat menunjukkan kompetensi dalam melaksanakan fungsinya.

Penelitian Y.Zhang et al (2007) menemukan hubungan antara kualitas komite audit dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. Hasil ini didukung oleh penelitian Michelon (2010) yang menemukan hubungan antara kemampuan keuangan komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012) menemukan tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dengan pengungkapan informasi.

H1: Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Sementara itu, Koh (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan. Para pemegang saham institusional akan berusaha untuk memperbaiki fungsi pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir masalah agensi yang mungkin timbul (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga dengan kepemilikan institusional pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif dan hal tersebut berpengaruh pada luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bogdan *et al.* (2005), Bronson et al (2006), Rouf dan Al-Harun (2011) dan Indriana, Widowati, dan Yulimar (2010) mendapatkan hasil adanya

pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, penelitian Primastuti dan Achmad (2012), Khomsiyah (2005), dan Zulfikar, Rosiana, dan Nariah (2015) memperoleh hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Independensi auditor dapat memberikan pengaruh pada pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Audit internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Dalam proses pengungkapan pengendalian internal, independensi auditor internal dibutuhkan agar pengungkapan dipublikasikan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga informasi yang dihasilkan ke pengguna laporan adalah benar adanya.

Independensi auditor yang diteliti oleh Yan Zhang et al (2007) terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal memberikan hasil yang signifikan diantara keduanya. Penelitian yang memberikan hasil yang sama dilakukan oleh Dominsoru (2009). Penelitian selanjutnya yang mengangkat independensi auditor dilakukan oleh Adani (2013) dan Sukiswo (2015) yang meneliti tentang pengaruh independensi auditor internal terhadap pengungkapan pengendalian internal dan menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan diantara keduanya.

**H3: Independensi auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian
Internal**

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara:

1. Variabel Kualitas Komite Audit, diukur dengan presentase keberadaan anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi (ACCT_ACFE), yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal.
2. Variabel Kepemilikan Institusional (IO), diukur dengan presentase kepemilikan saham institusional, yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal.
3. Variabel Independensi Auditor (AI), diukur dengan jumlah auditor internal, yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek atau sasaran dari penelitian “Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal” adalah data sekunder berupa *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2015.

Adapun ruang lingkup penelitian meliputi pembatasan variabel Kualitas Komite Audit yang diukur dengan presentase keberadaan komite yang memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi, kepemilikan institusional yang diukur dengan presentase kepemilikan institusional, dan independensi Auditor diukur dengan jumlah anggota audit internal.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak ke sumber data secara langsung, berupa *annual report* perusahaan manufaktur dari tahun 2014-2015 terdaftar di BEI yang didapatkan dari situs resmi BEI di <http://www.idx.co.id> maupun situs resmi masing-masing perusahaan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan (Supriyadi, 2014: 17). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh data keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI sejak 2014-2015.

Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi (Supriyadi, 2014:17). Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Supriyadi, 2014:22).

Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah:

1. Perusahaan dengan kategori non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai dengan 2015
2. Perusahaan tidak mengalami *delisting* dari BEI selama periode penelitian
3. Perusahaan menerbitkan *Annual Report* dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2014-2015
4. Perusahaan mengungkapkan data jumlah dan profil komite audit
5. Perusahaan menyediakan data presentase kepemilikan saham
6. Perusahaan mengungkapkan jumlah auditor internalnya
7. Perusahaan mengungkapkan seluruh atau sebagian indikator pengendalian internal

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen (Pengungkapan Pengendalian Internal) dengan variabel independen (Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor) dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan angka sebagai indikator variabel penelitian.

1. Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan Pengungkapan Pengendalian Internal sebagai variabel dependen atau variabel Y.

a. Definisi Konseptual

Pengungkapan pengendalian internal adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan yang dipublikasikan pada laporan tahunan perusahaan.

b. Definisi Operasional

Variabel dependen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Internal Control Disclosure Index* (ICDI). ICDI ditentukan dengan melakukan pengamatan keberadaan suatu kriteria informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila kriteria informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan perusahaan, maka akan diberi skor 1 (satu) pada kriteria tersebut. Apabila kriteria informasi yang ditentukan tidak terdapat dalam laporan tahunan perusahaan, maka akan diberi skor 0 (nol). Seluruh kriteria kemudian akan dijumlahkan untuk mengetahui skor perusahaan.

Pemilihan kriteria atas informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan ditentukan oleh peratur Kepala Bapepam No.X/K.6/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Kriteria informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan antara lain:

- 1) Komite Audit, mencakup didalamnya:
 - a) Nama

- b) Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukan
 - c) Riwayat pendidikan
 - d) Periode jabatan anggota komite audit
 - e) Pengungkapan independensi komite audit
 - f) Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya
 - g) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite audit
- 2) Uraian mengenai unit audit internal
- h) Nama
 - i) Riwayat jabatan
 - j) Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal
 - k) Struktur dan kedudukan unit audit internal
 - l) Tugas dan tanggung jawab unit audit internal
 - m) Uraian singkat pelaksanaan tugas audit internal
- 3) Uraian mengenai Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan
- n) Pengendalian keuangan dan operasional
 - o) Review atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal
- 4) Sistem Manajemen Resiko, mencakup didalamnya:
- p) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan
 - q) Jenis resiko dan cara mengelolanya
 - r) Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.

Kriteria sebanyak 18 poin diatas diasumsikan dapat mewakili keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh shareholder untuk dapat menggambarkan pelaksanaan pengungkapan informasi pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kriteria-kriteria tersebut akan menentukan skor perusahaan yang akan diukur dengan rumus berikut, yang telah diolah dari Paramitha (2012).

$$ICDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

$ICDI_j$ = *Internal Control Disclosure Index* perusahaan j

n_j = Jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan

X_{ij} = *Dummy* variabel; 1 (jika item I diungkapkan); 0 (jika item i tidak diungkapkan)

Dengan demikian maka $0 \leq \text{ICDI}_j \leq 1$.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah Kualitas Komite Audit (X_1), Kepemilikan Institusional (X_2), dan Independensi Auditor (X_3).

2.1 Kualitas Komite Audit

1) Definisi Konseptual

Keputusan Bapepam No.29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan bahwa kualitas pengungkapan informasi serta meningkatkan fungsi audit. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang komite audit memiliki keahlian pendidikan akuntansi.

2) Definisi Oprasional

Kualitas komite audit dalam penelitian ini diukur dengan persentase anggota audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan/atau keuangan (Zhang et al, 2007)

$$ACCT_ACFE = \frac{\sum \text{Anggota Komite Audit berlatar belakang keahlian keuangan/akuntansi}}{\sum \text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

2.2 Kepemilikan Institusional

1) Definisi Konseptual

Kepemilikan konstitusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial yang berperan penting dalam meminimalisir *agency conflict* yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen.

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan institusional diukur dengan presentase kepemilikan dengan rumusan jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dibagi jumlah saham yang diterbitkan (Haruman, 2007)

$$IO = \frac{\sum \text{Saham biasa yang dimiliki oleh institusional}}{\sum \text{Saham biasa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

2.3 Independensi Auditor

1) Definisi Konseptual

Independensi auditor adalah sikap ketidakberpihakan auditor terhadap suatu kepentingan tertentu. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan harus tidak bias sehingga independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan (Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely, 2010)

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, independensi auditor diukur dengan jumlah auditor internal dalam perusahaan (IA) (Siswanto, 2015).

AI = Jumlah anggota audit internal perusahaan

F. Teknis Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan langsung dengan pengumpulan data dan ukuran-ukuran pemusatan data dan penyajian hasil ukuran pemusatan data tersebut. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ukuran pemusatan data yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Aplikasi pendukung yang akan digunakan untuk mengolah data adalah aplikasi SPSS versi 24.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian dengan Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan adalah model regresi yang baik sehingga tidak terjadi bias dalam penelitian (Ghozali, 2001). Beberapa pengujian harus dilakukan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang digunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi, maka harus terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak (Sunyoto, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal. Penelitian ini menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji kenormalan data. Data akan dinyatakan berdistribusi secara normal apabila nilai probabilitas hasil uji berada dibawah 0.05.

b. Uji Multikolonieritas

Uji asumsi klasik ini diterapkan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antar variabel bebas (Sunyoto, 2011). Asumsi yang dibutuhkan adalah tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel

independen dalam model regresi. Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan mengamati nilai *tolerance* dan VIF pada hasil pengujian model. Model akan dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai *tolerance* diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik berikutnya yang dilakukan adalah uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesamaan dari varians residual observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2011). Jika varians pada residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka data disimpulkan tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji *Park* dalam menguji tingkat homogenitasnya. Hasil uji yang diharapkan adalah nilai signifikansi masing-masing variabel independen yang diuji berada diatas 0.05.

d. Uji Autokorelasi

Penelitian ini menguji tingkat autokorelasi model untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi (Sunyoto, 2011). Penelitian ini menguji tingkat korelasi model regresi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi dilakukan dengan mengamati nilai d terhadap nilai d_U dan

nilai dL . Kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

- 1) Tidak ada autokorelasi : $dU < d < 4-dU$
- 2) Ada autokorelasi positif : $dU > d$
- 3) Ada autokorelasi negatif : $d > 4-dL$
- 4) Tidak ada kesimpulan : $4-dU < d < 4-dL$

3. Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple regression*) dengan pertimbangan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen, yaitu Pengungkapan Pengendalian Internal dengan berbagai variabel independen, yaitu Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24.

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$$ICDI = \alpha + \beta_1 ACCT_ACFE + \beta_2 IO + \beta_3 AI + e \dots \dots (1)$$

Keterangan:	ICDI	= Pengungkapan Pengendalian Internal
	$\beta_1 \dots \beta_n$	= Arah koefisien regresi
	ACCT_ACFE	= Kualitas Komite Audit
	IO	= Kepemilikan Institusional
	AI	= Independensi Auditor
	e	= Residual Error

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dibuat merupakan rancangan uji hipotesis yang pada penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penilaian yaitu uji hipotesis t untuk menilai pengaruh variabel independen secara terpisah.

Dalam Kuncoro (2003), Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam mengikat variabel dependennya. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan ketidakakuratan sebesar 5% = 0,05.

Sehingga berdasarkan Ghozali (2002):

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak
- b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan dapat menerima H_A .

5. Uji Statistik F (Uji F)

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang diestimasi. Layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian berikutnya apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0.05 sehingga model dikatakan layak apabila nilai probabilitas F hitung tidak lebih dari 0.05.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006). Koefisien Determinasi (R^2) yang terdapat dalam analisis harus lebih dari 0, sehingga terbukti bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak pada interval $0 < R^2 < 1$. Apabila nilai R^2 mendekati 0, maka variabel independen memiliki pengaruh yang lemah terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen.

Bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah salah satu kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 akan meningkat walaupun variabel tersebut belum tentu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka, para peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 saat melakukan evaluasi mana model regresi terbaik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan tahunan serta laporan keuangan yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun *website* masing-masing perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena tingkat Pengungkapan Pengendalian Internalnya masih lemah dibandingkan sektor lain.

Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel adalah:

- a. Perusahaan dengan kategori non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai dengan 2015
- b. Perusahaan tidak mengalami *delisting* dari BEI selama periode penelitian
- c. Perusahaan menerbitkan *Annual Report* dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2014-2015
- d. Perusahaan mengungkapkan data jumlah dan profil komite audit
- e. Perusahaan menyediakan data presentase kepemilikan saham
- f. Perusahaan mengungkapkan jumlah auditor internalnya

- g. Perusahaan mengungkapkan seluruh atau sebagian indikator pengendalian internal

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 64 perusahaan dengan periode penelitian 2014-2015, sehingga jumlah sampel yang diteliti menjadi 64. Rincian pengambilan sampel tertera pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hasil Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015	143
2	Perusahaan yang <i>delisting</i> dari BEI 2014-2015	(2)
3	Perusahaan tidak menerbitkan <i>Annual Report</i> dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2014-2015	(1)
4	Perusahaan tidak mengungkapkan data jumlah dan profil komite audit	(1)
5	Perusahaan tidak mengungkapkan data presentase kepemilikan saham	(2)
6	Perusahaan tidak mengungkapkan data jumlah auditor internal	(105)
7.	Perusahaan tidak mengungkapkan seluruh indikator pengendalian internal	(0)
	Jumlah perusahaan yang dapat dianalisis	32
	Total sampel (34 perusahaan x 2 tahun)	64

Sumber: data diolah oleh Penulis (2017)

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap variabel Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor sebagai variabel independen dan Pengungkapan Pengendalian Internal sebagai variabel dependen. Pengukuran dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for the Sosial Science* (SPSS) versi 24. Uji statistik deskriptif yang dilakukan sebelum melakukan uji regresi berganda bertujuan untuk merangkum informasi yang tersedia sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Informasi yang ditampilkan dalam analisis deskriptif antara lain adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai terbesar (*maximum*), nilai terkecil (*minimum*), serta standar deviasi. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini ditampilkan pada table IV.2.

Tabel IV.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICDI	64	.39	1.00	.7735	.16062
ACCT_ACFE	64	.25	1.00	.7846	.24378
IO	64	.33	.96	.6747	.16413
AI	64	2.00	63.00	13.2188	15.13166
Valid N (listwise)	64				

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel IV.2, dapat dilihat nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi dari tiap-tiap variabel

dependen dan independen. Analisis statistik deskriptif seluruh periode pengamatan penelitian dengan masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Dependen

1.1 Pengungkapan Pengendalian Internal (ICDI)

Pengungkapan Pengendalian Internal diukur dengan menggunakan indeks yang mengacu pada peraturan Kepala Bapepam No.X/K.6/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Setiap perusahaan diberikan nilai atas setiap pengungkapan pada item-item yang telah ditentukan terkait seberapa luas pengungkapan yang dilakukan terhadap pengendalian internal perusahaan. Indeks ini memberikan gambaran terkait tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik tingkat pengendalian internalnya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang tertera pada tabel IV.2, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pengungkapan Pengendalian Internal sebesar 0,7735 atau sebesar 77,35%. Hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan sampel termasuk dalam kategori baik karena nilai Pengungkapan Pengendalian Internal berada diatas 50%. Nilai tertinggi sebesar 1,00 atau 100% Pengungkapan Pengendalian Internal dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk selama dua tahun periode berturut-turut. Nilai 1,00 mencerminkan bahwa perusahaan mengungkapkan seluruh

item yang digunakan sebagai pengukur pada penelitian ini. Sedangkan PT Kalbe Farma Tbk, Astra Internasional dan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk memperoleh nilai tertinggi hanya pada tahun 2014. Nilai terendah untuk Pengungkapan Pengendalian Internal diperoleh sebesar 0,39 atau 39% oleh PT Malindo Feedmill Tbk pada tahun 2014. Poin 39% menunjukkan bahwa PT Malindo Feedmill Tbk hanya mengungkapkan 7 dari 18 poin yang harus diungkapkan pada *Annual Report* 2014.

Variabel Independen

1.2 Keahlian Komite Audit (ACCT_ACFE)

Variabel keahlian komite audit yang diukur dengan membagi total komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dengan seluruh anggota komite audit perusahaan adalah variabel independen pertama dalam penelitian ini. Pada tabel IV.2 diperoleh bahwa nilai tertinggi untuk ACCT_ACFE pada penelitian ini adalah 1,00. Hal ini berarti seluruh anggota komite audit pada perusahaan dengan nilai ACCT_ACFE tertinggi memiliki keahlian baik di bidang akuntansi maupun keuangan. Perusahaan sampel yang memiliki nilai ACCT_ACFE 1,00 selama periode 2014-2015 secara berturut-turut antara lain PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Pyridam Farma Tbk. sedangkan nilai minimum dari ACCT_ACFE adalah 0,25 atau 25%. Hal ini berarti, perusahaan sampel dengan nilai ACCT_ACFE terendah hanya memiliki 25% anggota komite audit perusahaan

dengan keahlian akuntansi atau keuangan dari seluruh anggota komite audit. Perusahaan sampel dengan nilai ACCT_ACFE terendah adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2014 dengan hanya terdapat satu orang komite audit dengan keahlian dari empat orang anggota komite audit perusahaan.

Nilai rata-rata ACCT_ACFE pada penelitian ini adalah sebesar 0.7846 atau 78,46%. Nilai ini berarti sebanyak lebih dari 50% perusahaan sampel memiliki komite audit dengan keahlian akuntansi maupun keuangan.

1.3 Kepemilikan Institusional (IO)

Variabel independen berikutnya adalah Kepemilikan Institusional yang didapatkan dari hasil bagi jumlah kepemilikan saham institusional dengan jumlah seluruh saham biasa. Rasio ini dapat menunjukkan proporsi kepemilikan pihak institusional pada perusahaan. Nilai tertinggi dari IO pada penelitian ini adalah 0.96 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini memiliki pendanaan modal sebesar 96% keseluruhan permodalannya dari pihak institusional. Perusahaan dengan nilai IO tertinggi adalah PT Chandra Asri Petrokimia Indonesia dengan total modal institusional sebesar Rp 3.146.895.311 selama periode penelitian, yaitu 2014 dan 2015. Sedangkan nilai IO terendah sebesar 0.33 atau 33%. Nilai ini menjelaskan bahwa pihak institusional hanya memiliki persentase modal saham sebesar 33% atau sebesar Rp 294.524.876 dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan.

Nilai rata-rata IO pada peeliatian ini adalah 0.6747 atau 67,47% sehingga menggambarkan keadaan perusahaan sample penelitian dimana sebagian besar pendanaan modal saham perusahaan diberikan oleh pihak institusional.

1.4 Independensi Auditor (AI)

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah AI. AI diukur dengan jumlah anggota audit internal perusahaan sampel. Nilai rata-rata AI pada penelitian ini adalah 13,21 atau dapat disimpulkan sebanyak 14 orang. Nilai tertinggi untuk AI adalah 63 yang artinya perusahaan yang mendapatkan nilai AI tertinggi memiliki anggota audit internal sebanyak 63 orang. Perusahaan dengan jumlah anggota audit internal terbanyak adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada 2014 dan 2015 serta Astra Internasional pada 2014. Sedangkan nilai terendah untuk variabel AI adalah 2. Nilai terendah AI ini menggambarkan perusahaan sampel dengan jumlah anggota audit internal sebanyak 2 orang. Terdapat beberapa perusahaan yang memiliki anggota komite audit sebanyak 2 orang, antara lain PT Pyridam Farma Tbk, PT Nipress Tbk dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk sepanjang periode penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, digunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor) memengaruhi variabel terikat (Pengungkapan Pengendalian Internal). Agar persamaan regresi tersebut layak digunakan atau diaplikasikan, maka terdapat beberapa uji yang harus dipenuhi antara lain terdistribusi secara normal,

bebas dari multikoleniaritas dan heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hasil pengujian:

2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen keduanya berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan mengamati nilai probabilitas signifikan terhadap variabel. Apabila probabilitas hasil uji bernilai lebih dari 0.05 maka data dapat disimpulkan berdistribusi secara normal. Namun, apabila hasil uji bernilai kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini ditampilkan pada tabel IV.3.

Tabel IV.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14330233
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.041
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel IV.3, terlihat nilai probabilitas sebesar 0.200. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan, nilai probabilitas sebesar $0.200 > 0.05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal.

2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikoleniaritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan pengamatan terhadap nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktors*). Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.1 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah model regresi terkena multikolonieritas atau terdapat korelasi antar variabel model. Selain itu, jika nilai VIF lebih kecil dai 10 maka model regresi dapat dinyatakan bebsa dari multikolonieritas. Namun, apabila nilai VIF melebihi 10, maka model regresi dapat disimpulkan terkena multikoleniaritas. Hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ACCT_ACFE	.989	1.011
	IO	.897	1.114
	AI	.889	1.125

a. Dependent Variable: ICDI

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.4, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji Park. Model dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hasil pengujian heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.228	.636		-8.221	.000
	LNACCT_ACFE	-.635	.615	-.129	-1.032	.306
	LNIO	-1.880	.945	-.254	-1.989	.051
	LNAI	-.329	.255	-.167	-1.293	.201

a. Dependent Variable: LNICDI2

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel IV.5 menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji ada atau tidak autokorelasi. Penentuan autokorelasi diamati dari nilai d . Nilai d yang terletak antara d_U dan $4-d_U$ disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat autokorelasi. Nilai d lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $4-d_U$ menyimpulkan bahwa pada model

terdapat autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 ^a	.201	.161	.14661	1.958

a. Predictors: (Constant), AI, ACCT_ACFE, IO

b. Dependent Variable: ICDI

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Hasil pengujian autokorelasi yang pada tabel IV.6 menampilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.958. Dalam penelitian ini, diketahui nilai d_U dan $4-d_U$ adalah sebesar 1.6946 dan 2.3054, sehingga $d_U < d < 4-d_U$ atau $1.6946 < 1.958 < 2.3054$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

3. Regresi Linear Berganda

Hasil regresi dari penelitian ini adalah:

Tabel IV.7
Hasil Uji Regresi Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.575	.110		5.222	.000
	ACCT_ACFE	.003	.076	.005	.044	.965
	IO	.191	.119	.195	1.606	.114
	AI	.005	.001	.475	3.885	.000

a. Dependent Variable: ICDI

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil regresi diatas, persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ICDI} = 0.575 + 0.003 \text{ ACCT_ACFE} + 0.191 \text{ IO} + 0.005 \text{ AI} + \varepsilon$$

Keterangan:

ICDI = Pengungkapan Pengendalian Internal

ACCT_ACFE = Keahlian Komite Audit

IO = Kepemilikan Intitusional

AI = Independensi Auditor

ε = Error

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (α) adalah 0.575 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas didalam penelitian, yaitu keahlian komite audit (ACCT_ACFE), Kepemilikan Institusional (IO), dan Independensi Auditor (AI) dianggap konstan atau tetap, maka nilai variabel terikat, Pengungkapan Pengendalian Internal, bernilai 0.575
- 2) Koefisien keahlian komite audit (ACCT_ACFE) sebesar 0.003 berarti apabila keahlian komite audit naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lain bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat sebesar 0.003. koefisien keahlian komite audit yang bernilai positif mengindikasikan hubungan positif antara keahlian komite audit dan Pengungkapan Pengendalian Internal.
- 3) Koefisien Kepemilikan Institusional (IO) sebesar 0.191 berarti apabila keahlian komite audit naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lain bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat sebesar 0.191. Koefisien Kepemilikan Institusional yang bernilai positif menandakan terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dan Pengungkapan Pengendalian Internal.
- 4) Koefisien Independensi Auditor (AI) sebesar 0.005 berarti apabila Independensi Auditor naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lain bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat sebesar 0.005. Koefisien Independensi Auditor yang bernilai positif

mengindikasikan hubungan positif antara Independensi Auditor dan Pengungkapan Pengendalian Internal.

4. Uji Statistik t

Pengujian signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai *probability*. Apabila nilai *probability* ≤ 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai *probability* > 0.05 , maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selain nilai *probability*, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai t. pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebas dapat dinyatakan tidak memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat melalui tabel IV.8.

Tabel IV.8
Hasil Uji Statistik t

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.575	.110		5.222	.000
	ACCT_ACFE	.003	.076	.005	.044	.965
	IO	.191	.119	.195	1.606	.114
	AI	.005	.001	.475	3.885	.000

a. Dependent Variable: ICDI

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Penjelasan pengujian atas masing-masing variabel dipaparkan pada penjelasan berikut:

4.1 Pengaruh Kualitas Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Hipotesis perama pada penelitian ini adalah H_1 : Kualitas Komite Audit (X1) berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal (Y). Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada tabel IV.8, Kualitas Komite Audit memiliki t_{hitung} sebesar 0.044 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.965. hasil pengujian ini menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} ($0.044 < 2.00030$) dengan tingkat signifikansi $0.965 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa H_1 ditolak atau dengan kata lain Kualitas Komite Audit tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal.

4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Hipotesis kedua penelitian ini adalah H_2 : Kepemilikan Institusional (X2) berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal (Y). Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} Kepemilikan Institusional sebesar 1.605 dan tingkat signifikansi sebesar 0.114. Hasil pengujian menunjukkan bahwa t_{hitung} bernilai lebih kecil daripada t_{tabel} ($1.605 < 2.00030$) dengan tingkat signifikansi $0.114 > 0.05$. Dengan demikian, maka H_2 pada penelitian ini ditolak, atau dengan kata lain Kepemilikan Institusional berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

4.3 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah H_3 : Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Pada uji t penelitian ini, nilai t_{hitung} Independensi Auditor adalah sebesar 3.885 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t_{hitung} bernilai lebih besar daripada t_{tabel} ($3.885 > 2.00030$) dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, maka H_3 pada penelitian ini diterima atau dapat dikatakan bahwa Independensi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Pengaruh ini bersifat positif yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang positif.

5. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji kelayakan model. Pengujian ini mengidentifikasi model regresi yang diestimasi apakah layak untuk digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengamatan pada uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F hitung dan membandingkannya dengan tingkat kesalahan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hasil uji statistik F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.9.

Tabel IV.9
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.324	3	.108	5.026	.004 ^b
	Residual	1.290	60	.021		
	Total	1.614	63			

a. Dependent Variable: ICDI

b. Predictors: (Constant), AI, ACCT_ACFE, IO

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh Penulis (2017)

Uji statistik pada penelitian ini menghasilkan nilai probabilitas F hitung sebesar 0.004. tingkat kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya adalah sebesar 0.05 sehingga didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F hitung lebih kecil daripada tingkat kesalahan atau $0.004 < 0.05$. kesimpulan yang diambil dari Uji Statistik F adalah model regresi layak untuk digunakan dalam menjelaskan keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat.

6. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini ditampilkan pada tabel IV.10.

Tabel IV.10
Hasil Uji Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.201	.161	.14661

a. Predictors: (Constant), AI, ACCT_ACFE, IO

b. Dependent Variable: ICDI

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji determinasi R^2 yang ditampilkan pada tabel IV.10 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.161. Hal ini berarti bahwa sebanyak 16.1% Pengungkapan Pengendalian Internal dipengaruhi oleh variabel Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian

Internal

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi variabel kualitas komite audit yang diukur dengan ACCT_ACFE memiliki nilai koefisien dan statistik yang positif dan probabilitas berada diatas 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Kualitas Komite Audit tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan kata lain hipotesis pertama **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kualitas Komite Audit, maka tidak berarti semakin tinggi pula Pengungkapan Pengendalian Internal. Hasil ini disebabkan oleh korelasi atau tingkat signifikansi antara Kualitas Komite Audit dan Pengungkapan Pengendalian Internal ini sangat lemah dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2015) yang menemukan bahwa keahlian komite audit tidak memengaruhi pengungkapan informasi pengendalian internal. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2015) dan Y.Zhang (2007) yang menemukan bahwa ada hubungan antara kualitas komite audit dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. Salah satu penyebab perbedaan hasil penelitian ini adalah perbedaan item-item penelitian yang digunakan. Dewayanto (2015) dan Y.Zhang (2007) menggunakan item-item pengendalian yang berasal dari COSO dalam menggambarkan pengungkapan pengendalian internal. Hasil ini juga tidak berhasil mendukung teori

bahwa semakin tinggi Kualitas Komite Audit maka Pengungkapan Pengendalian Internalnya akan semakin luas pula.

Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kualitas Komite Audit tidak memengaruhi tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal. Contohnya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki nilai ACCT_ACFE sebesar 0.25 dan 0.50 dengan nilai ICDI sebesar 0.78 untuk dua tahun pengamatan. Sementara Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) memiliki nilai ACCT_ACFE sebesar 1 dan 0.67 dengan nilai ICDI sebesar 0.83 untuk dua tahun pengamatan. Data tersebut menggambarkan bahwa perubahan tingkat Kualitas Komite Audit baik pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Chandra Asri Petrochemical Tbk tidak menimbulkan perubahan pada tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Komite Audit memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal secara positif namun tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena tanggung jawab komite audit tidak terkonsentrasi pada pengendalian internal namun lebih berfokus pada laporan keuangan perusahaan.

Melihat hasil pengujian dalam penelitian ini, perubahan tingkat Kualitas Komite Audit tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh tanggung jawab atas pengendalian internal tidak sepenuhnya diemban oleh komite audit. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan pada bagian tugas dan tanggung jawab komite audit. Contoh perusahaan dengan tugas komite audit yang lebih berfokus pada laporan keuangan dibandingkan pengendalian internal perusahaan adalah PT Chandra

Asri Petrochemical Tbk. Tugas dan wewenang komite audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menunjukkan 5 dari 9 tugas mereka berkaitan dengan laporan keuangan, akuntansi, maupun lingkungan keuangan perusahaan lainnya dan 4 sisanya berkaitan dengan hal diluar itu. Berdasarkan contoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk lebih berfokus pada laporan keuangan maupun keadaan keuangan perusahaan dibandingkan dengan pengendalian internal perusahaan.

Rasio komite audit dengan kemampuan akuntansi atau keuangan merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas komite audit perusahaan, yang dalam penelitian ini mencerminkan tingkat yang baik atau dengan kata lain anggota komite audit perusahaan diisi oleh orang-orang dengan keahlian yang baik. Nilai rasio tersebut ternyata tidak dapat menjadi acuan suatu perusahaan meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaannya karena terdapat faktor lain yang berasal dari dalam perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Dalam penelitian ini, Kepemilikan Institusional diperoleh dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan seluruh saham biasa yang diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dari variabel Kepemilikan Institusional berada diatas 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan kata lain hipotesis kedua **ditolak**. Hal ini berarti bahwa jika semakin luas

presentasi Kepemilikan Institusional, maka tidak berarti bahwa Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan semakin luas pula. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar, Rosiana dan Nariah (2015) serta bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Widowati, dan Yulimar (2010).

Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat Kepemilikan Institusional, maka tidak memengaruhi tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Contohnya, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) yang memiliki kepemilikan institusional sebesar 0.9003 atau sebesar 90.03% dari total struktur kepemilikan modal selama periode pengamatan memiliki nilai Pengungkapan Pengendalian Internal yang tidak sama selama periode pengamatan. Nilai pengungkapan pengendalian internal PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah sebesar 0.7778 atau 77.78% pada tahun 2014 dan 0.8889 atau 88.89% pada tahun 2015. Data yang sama juga ditunjukkan oleh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang bergerak di sector yang sama dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. PT Kalbe Farma Tbk memiliki nilai Kepemilikan Institusional sebesar 0.5669 atau sebesar 56,69% dari keseluruhan kepemilikan modal. Dengan nilai tersebut, nilai Pengungkapan Pengendalian Internal PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2014 adalah sebesar 1 atau 100% pada tahun 2014 dan 0.9444 atau 94.44% pada tahun 2015. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi kepemilikan Institusional.

Rasio kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak terbukti memengaruhi tingkat pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Sampel penelitian tidak menunjukkan banyak perubahan pada tingkat Kepemilikan Institusional sedangkan tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan mengalami perubahan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi tidak secara langsung memiliki tingkat pengungkapan pengendalian internal yang tinggi pula. Hasil penelitian yang demikian dapat disebabkan oleh investor institusi yang tidak menggunakan haknya dengan optimal dalam mengawasi manajemen (Collet dan Deadman, 2010). Pemegang saham institusi dianggap kurang memberikan perhatian ataupun terlalu memercayakan manajemen sehingga mengurangi tingkat pengawasan terhadap perusahaan tempat sahamnya ditanamkan. Hasil penelitian ini dapat pula didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Lukviarman (2004) dalam Zulfikar, et al (2015) bahwa struktur kepemilikan di Indonesia masih terfokus di kepemilikan keluarga.

3. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Penelitian ini mengukur independensi auditor dengan jumlah auditor internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas variabel berada dibawah tingkat signifikansi 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Independensi Auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan kata lain hipotesis ketiga **diterima**. Hasil ini menunjukkan

bahwa setiap ada peningkatan pada Independensi Auditor, maka peningkatan akan terjadi pula pada Pengungkapan Pengendalian Internal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara independensi auditor dengan pengendalian internal sehingga apabila independensi auditor semakin baik, maka pengendalian internal perusahaan akan semakin baik juga. Hasil ini mendukung teori bahwa auditor berperan sebagai pihak penilai independen yang bertugas untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control perusahaan (Lawrence B.Sawyer (2005: 7) dalam Adani (2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin independen auditor internal maka akan semakin baik pula Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan.

Unit Audit Internal atau Sistem Pengendalian Internal terbukti secara langsung memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal karena tugas dan tanggung jawab yang diemban secara langsung menyentuh ranah pengendalian internal. Sebagai contoh, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal PT Akasha Wira International Tbk 6 dari 9 tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal bersentuhan langsung dengan ranah pengendalian internal.

Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi Auditor yang mengalami perubahan akan merubah tingkat pengungkapan pengendalian internal ke arah yang sama. Contohnya, Astra Otoparts Tbk (AUTO) yang memiliki 16 orang auditor internal pada tahun 2014 memiliki tingkat Pengungkapan Pengendalian

Internal perusahaan sebesar 0.7778 atau 77.78%. Pada tahun berikutnya, saat auditor internal perusahaan berjumlah 18 orang, tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan meningkat menjadi 100%. Sedangkan Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) yang pada tahun 2014 memiliki 12 orang anggota audit internal memiliki tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal sebesar 0.6667 atau 66.67%. Kemudian pada tahun berikutnya, tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan menurun menjadi 0.5555 atau 55.56% sejalan dengan berkurangnya jumlah auditor internal perusahaan menjadi 11 orang. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Independensi Auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 2 tahun, yaitu tahun 2014-2015. Data pada penelitian ini didapatkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan sampel yang didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia maupun *website* perusahaan sampel.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perusahaan serta tujuan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kualitas Komite Audit (ACCT_ACFE) yang diukur dengan rasio jumlah komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi ditemukan tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal. Hal ini dikarenakan peran dalam memengaruhi tingkat pengungkapan pengendalian internal tidak terbatas hanya pada komite audit saja melainkan didukung oleh beberapa unit lain dalam perusahaan seperti Sistem Pengendali Internal maupun Dewan Komisaris.

2. Kepemilikan Institusional (IO) yang diukur dengan rasio kepemilikan saham institusional ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Hasil ini disebabkan oleh pemilik modal institusional yang kurang memberikan pengawasan kepada manajemen perusahaan sehingga dianggap tidak menggunakan hak pengawasannya secara optimal.
3. Independensi Auditor (AI) yang diukur dengan jumlah anggota audit internal perusahaan ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakberpihakan auditor dalam melakukan penilaian akan meningkatkan nilai pengendalian internalnya.

B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Sementara kualitas komite audit dan kepemilikan institusional terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi yaitu:

1. Independensi Auditor adalah faktor yang memengaruhi tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Pengungkapan Pengendalian Internal merupakan salah satu pengungkapan yang penting dilakukan oleh perusahaan

agar para pengguna informasi mengetahui keadaan internal perusahaan. Pengungkapan pengendalian internal perusahaan juga mampu memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan independensi dari anggota audit internalnya agar tingkat pengungkapan pengendalian internalnya semakin baik. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat menyeimbangkan jumlah anggota auditor internal dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar tingkat pengendalian internal perusahaan akan semakin baik sehingga tingkat kepercayaan investor meningkat yang akan memudahkan perusahaan untuk memperoleh modal usaha.

2. Pengungkapan pengendalian internal merupakan salah satu pengungkapan yang masih jarang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, padahal sudah ada regulasi yang mengikat. Pemerintah disarankan untuk membuat regulasi yang lebih kuat atau meningkatkan pengawasan terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak para penanam modal serta meningkatkan kualitas dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

C. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang dengan adanya masukan mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan sampel dengan kurun waktu 2 tahun. Sampel yang didapat adalah 64 perusahaan dari keseluruhan 286 perusahaan. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan cara menambah jumlah periode pengamatan agar dapat mencerminkan pengungkapan pengendalian internal di kurun waktu yang lama sehingga memberikan hasil yang lebih baik.
2. Variabel Pengungkapan Pengendalian Internal pada penelitian ini menggunakan indeks dengan item-item yang diambil dari Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, poin g tentang Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) no 3, 6, 7, dan 8. Penelitian berikutnya disarankan untuk menguji seluruh item poin g pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 sehingga mampu menggambarkan keseluruhan keadaan Pengendalian Internal perusahaan.
3. Nilai koefisien determinasi penelitian ini berada pada angka yang kecil sehingga masih belum dapat menggambarkan secara jelas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal. Penelitian berikutnya disarankan untuk menguji faktor-faktor lain yang memengaruhi

Pengungkapan Pengendalian Internal. Faktor-faktor tersebut antara lain Keberadaan Direksi Asing, Ukuran Dewan Komisaris, Tingkat Kompensasi Eksekutif, dan Keahlian Manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Yusrina. 2013. Influence of Internal Auditor Independence and Audit Committee of Internal Control (Research in Banking Bandung). *Journal of Economic*. UNIKOM.
- Agyei-Mensah, Ben Kwane. 2016. Internal Control Information Disclosure and Corporate Governance: Evidence From an Emerging Market. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 16 No 1 pp 79-95.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2012. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal KEP-413/BL/2012. Retrieved 12 Maret from Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/emitendan-perusahaan-publik/Pages/peraturan-lainnya.aspx>
- Ben Kwame Agyei-Mensah ,. 2016. Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market. *Corporate Governance*, Vol. 16 pp.79-95.
- Bronson, S. N., J. V. Carcello, and K. Raghunandan. 2006. Firm Characteristics And Voluntary Management Reports On Internal Control. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 25 (2): 25–39.
- Deumes, Rogier dan Knechel, W. Robert. 2008. Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk Management and Control System. *Auditing: A Journal Of Practice & Theory*. Vol. 27, No. 1. Pp.35-66.
- Dewayanto, Totok. 2015. Eksistensi Direksi Asing Dalam Hubungan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. *Prosiding Hasil Penelitian dan PPM 2015*. Bidang Ekonomi: 1-12.
- Dominsoru, Sorinel. 2008. Auditor Independence, Audit Committee Quality and Internal Control Weakness. *Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal)*. Vol.1, Issue 11, pages 7-12.
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Yogyakarta. 2001.
- Giovanna Michelon, Sergio Beretta, Saverio Bozzolan. *Disclosure on internal control systems as a substitute of alternative governance mechanisms [J]*. *Business Management Science*, 2009, 56(12):109-226.

- Hastuti, Theresia Dwi. 2005. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan. Seminar Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Juwitasari, Ratih. 2008. Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar Dalam BEI Tahun 2007. Tesis, Universitas Indonesia. Jakarta
- Khrisnan, Jayanti. 2005. Audit Committee Quality and Internal Control: An Empirical Analysis. *The Accounting Review* Vol 80 No 2 pp 649-675. Temple University.
- Han Li. 2015. Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence form China. *International Journal of Financial Research*. Vol. 6 No. 2
- Lin, *et al.* 2011. The Role of internal audit function in the disclosure of internal control weaknesses. *The Accounting Review*. American Accounting Association. Vol. 86, No.1 : 287-323.
- Leone, Andrew J. 2007. Factors Related To Internal Control Disclosure. *Journal Of Accounting and Economics*. 44: 224-237.
- Mautz, R.K dan Sharaf, H.A. 1993. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota: American Accounting Association.
- Nariah, Rosiana, dan Zulfikar. 2015. Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.2.
- www.ojk.go.id (diakses pada 12 Maret 2017 pukul 20.11)
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. X/K.6/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Badan Pengawas Pasar Modal. Jakarta.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01-MBU-2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN. Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2015. *Audit Kontemporer*. Jakarta, Salemba Empat.
- Tarjo. 2008. Pegaaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Seminar Nasional Akuntansi IX. Padang.

- Siagian, Siregar dan Rahadian. 2013. Corporate Governance, Disclosure Quality, Ownership Structure and Firm Value.
- Sjarief, Ety, dan Widyastuti. 2015. The Internal Control Disclosure, The Executive Compensation, and The Timeless od Financial Reporting. Full Paper Proceeding BESSH-2015, Vol. 24 Issue.3.1-6.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, ALFABETA
- Suhardjanto dan Dewi. 2011. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perusahaan: studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal keuangan dan perbankan*. 15(1); 105 – 118
- Supriyadi, Edy. 2014. SPSS+Amos, *Statistical Data Analyst*. Jakarta. Penerbit IN Media.
- Y.Zhang, et al. 2007. Audit Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*. 26: 300-327
- Zhao, Xi dan Guo, Jun. 2013. Board Governance, Disclosure of Internal Control Attestation Report and Corporate Performance. International Conference on Management Science and Engineering (20th). China.
- Zulfikar, Rosiana, dan Nariah. 2015. *Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Akasha Wira International Tbk	ADES
2	Polychem Indonesia Tbk	ADMG
3	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
4	Argha Karya Prima Indonesia Tbk	AKPI
5	Asashimas Flat Glass Tbk	AMFG
6	PT Astra International Tbk	ASII
7	Astra Otoparts Tbk	AUTO
8	Barito Pasific Tbk	BRPT
9	PT Chitose Internasional Tbk	CINT
10	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
11	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	DVLA
12	Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW
13	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	INTP
14	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	JPFA
15	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	KAEF
16	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
17	PT Grand Kartech Tbk	KRAH
18	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS
19	Lion Metal Works Tbk	LION
20	Malindo Feedmill Tbk	MAIN
21	Mayora Indah Tbk	MYOR
22	Nipress Tbk	NIPS
23	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA
24	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY
25	Sierad Produce Tbk	SIPD

26	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR
27	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR
28	PT Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL
29	Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
30	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ
31	Unilever Indonesia Tbk	UNVR
32	Wijaya Karya Beton	WTON

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Lampiran 2 – Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia

KODE	Thn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Skor
ADES	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0.7778
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0.7778
ADMG	2014	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0.5556
	2015	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8889
AISA	2014	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0.7778
	2015	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0.7778
AKPI	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0.8889
	2015	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0.8333
AMFG	2014	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8333
	2015	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8889
ASII	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9444
AUTO	2014	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0.7778
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BRPT	2014	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0.7778
	2015	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0.7778
CINT	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0.7778
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0.8889
CPIN	2014	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0.6111
	2015	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0.6111
DVLA	2014	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0.6667
	2015	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.6111
FASW	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0.6667
	2015	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0.5556

SMBR	2014	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8889
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMGR	2014	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2015	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SRIL	2014	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0.6111
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TPIA	2014	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0.8333
	2015	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0.8333
ULTJ	2014	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0.7778
	2015	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0.7222
UNVR	2014	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0.7778
	2015	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0.8333
WTON	2014	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8889
	2015	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8889

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Lampiran 3 – Kualitas Komite Audit

Kode	Thn	Komite audit dengan keahlian	Jumlah Komite audit	Kualitas Komite Audit
ADES	2014	2	3	0.6667
	2015	3	3	1
ADMG	2014	2	3	0.6667
	2015	3	3	1
AISA	2014	1	4	0.25
	2015	2	4	0.5
AKPI	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
AMFG	2014	4	4	1
	2015	4	4	1
ASII	2014	4	4	1
	2015	4	4	1
AUTO	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
BRPT	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
CINT	2014	2	3	0.6667
	2015	2	3	0.6667
CPIN	2014	4	5	0.8
	2015	4	5	0.8

DVLA	2014	2	3	0.6667
	2015	2	3	0.6667
FASW	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
INTP	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
JPFA	2014	2	3	0.6667
	2015	2	3	0.6667
KAEF	2014	3	3	1
	2015	2	3	0.6667
KLBF	2014	2	3	0.6667
	2015	3	3	1
KRAH	2014	2	3	0.6667
	2015	2	3	0.6667
KRAS	2014	4	4	1
	2015	1	3	0.3333
LION	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
MAIN	2014	3	5	0.6000
	2015	3	5	0.6000
MYOR	2014	2	3	0.6667
	2015	2	3	0.6667
NIPS	2014	3	3	1
	2015	2	3	0.6667
PYFA	2014	3	3	1
	2015	3	3	1

RICY	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
SIPD	2014	1	3	0.3333
	2015	1	3	0.3333
SMBR	2014	1	3	0.3333
	2015	1	3	0.3333
SMGR	2014	2	4	0.5
	2015	2	4	0.5
SRIL	2014	2	3	0.6667
	2015	3	3	1
TPIA	2014	3	3	1
	2015	2	3	0.6667
ULTJ	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
UNVR	2014	3	3	1
	2015	3	3	1
WTON	2014	1	3	0.3333
	2015	1	3	0.3333

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Lampiran 4 – Kepemilikan Institusional

Kode	Thn	Kepemilikan Saham Institusional	Jumlah Saham Biasa	Kepemilikan Institusional
ADES	2014	542,347,113	589,896,000	0.9194
	2015	542,347,113	589,896,000	0.9194
ADMG	2014	2,919,564,417	3,889,179,559	0.7507
	2015	3,324,921,010	3,889,179,559	0.8549
AISA	2014	1,963,346,000	3,218,600,000	0.6100
	2015	3,013,366,423	3,218,600,000	0.9362
AKPI	2014	398,747,943	680,000,000	0.5864
	2015	398,747,943	680,000,000	0.5864
AMFG	2014	367,717,500	434,000,000	0.8473
	2015	368,117,700	434,000,000	0.8482
ASII	2014	20,288,255,040	40,483,553,140	0.5011
	2015	20,288,255,040	40,483,553,140	0.5011
AUTO	2014	3,855,786,337	4,819,733,000	0.8000
	2015	3,855,786,337	4,819,733,000	0.8000
BRPT	2014	4,555,282,703	6,979,892,784	0.6526
	2015	4,637,458,703	6,979,892,784	0.6644
CINT	2014	696,500,000	1,000,000,000	0.6965
	2015	696,500,000	1,000,000,000	0.6965

CPIN	2014	9,106,385,410	16,398,000,000	0.5553
	2015	9,106,385,410	16,398,000,000	0.5553
DVLA	2014	1,037,800,912	1,115,925,300	0.9300
	2015	1,037,800,912	1,115,925,300	0.9300
FASW	2014	1,851,885,000	2,477,888,787	0.7474
	2015	1,856,242,100	2,477,888,787	0.7491
INTP	2014	2,357,216,097	3,681,231,699	0.6403
	2015	2,357,216,097	3,681,231,699	0.6403
JPFA	2014	6,130,699,735	10,640,198,170	0.5762
	2015	6,165,985,835	10,640,198,170	0.5795
KAEF	2014	5,000,000,000	5,554,000,000	0.9003
	2015	5,000,000,000	5,554,000,000	0.9003
KLBF	2014	26,572,005,085	46,875,122,110	0.5669
	2015	26,572,005,085	46,875,122,110	0.5669
KRAH	2014	807,550,000	971,190,000	0.8315
	2015	807,551,300	971,190,000	0.8315
KRAS	2014	12,700,000,000	15,775,000,000	0.8051
	2015	12,700,000,000	15,775,000,000	0.8051
LION	2014	30,012,000	52,016,000	0.5770
	2015	30,012,000	52,016,000	0.5770

MAIN	2014	1,001,675,000	1,791,000,000	0.5593
	2015	1,278,186,442	2,238,750,000	0.5709
MYOR	2014	294,524,876	894,347,989	0.3293
	2015	294,524,876	894,347,989	0.3293
NIPS	2014	935,237,319	1,486,666,666	0.6291
	2015	935,237,319	1,486,666,666	0.6291
PYFA	2014	288,119,974	535,080,000	0.5385
	2015	288,119,974	535,080,000	0.5385
RICY	2014	308,287,600	641,717,510	0.4804
	2015	308,287,600	641,717,510	0.4804
SIPD	2014	3,892,148,355	9,391,108,493	0.4145
	2015	537,842,717	939,110,900	0.5727
SMBR	2014	7,500,000,000	9,837,678,500	0.7624
	2015	7,500,000,000	9,837,678,500	0.7624
SMGR	2014	3,025,408	5,931,520	0.5101
	2015	3,025,408	5,931,520	0.5101
SRIL	2014	10,425,274,040	18,592,888,040	0.5607
	2015	10,425,274,040	18,592,888,040	0.5607
TPIA	2014	3,146,895,311	3,286,962,558	0.9574
	2015	3,148,234,301	3,286,962,558	0.9578

ULTJ	2014	1,345,697,026	2,888,382,000	0.4659
	2015	1,285,697,026	2,888,382,000	0.4451
UNVR	2014	6,484,877,500	7,630,000,000	0.8499
	2015	6,484,877,500	7,630,000,000	0.8499
WTON	2014	6,266,551,749	8,338,308,649	0.7515
	2015	6,084,246,149	8,338,308,649	0.7297

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Lampiran 5 – Jumlah Auditor Internal

Kode	Tahun	Jumlah Auditor Internal
ADES	2014	3
	2015	3
ADMG	2014	8
	2015	8
AISA	2014	4
	2015	16
AKPI	2014	2
	2015	2
AMFG	2014	3
	2015	3
ASII	2014	63
	2015	59
AUTO	2014	16
	2015	18
BRPT	2014	4
	2015	4
CINT	2014	3
	2015	3
CPIN	2014	15
	2015	17
DVLA	2014	7
	2015	7

FASW	2014	12
	2015	11
INTP	2014	11
	2015	11
JPFA	2014	14
	2015	15
KAEF	2014	25
	2015	20
KLBF	2014	19
	2015	15
KRAH	2014	4
	2015	3
KRAS	2014	30
	2015	30
LION	2014	3
	2015	3
MAIN	2014	11
	2015	11
MYOR	2014	37
	2015	37
NIPS	2014	2
	2015	2
PYFA	2014	2
	2015	2
RICY	2014	4
	2015	4

SIPD	2014	10
	2015	9
SMBR	2014	8
	2015	6
SMGR	2014	63
	2015	63
SRIL	2014	4
	2015	4
TPIA	2014	6
	2015	10
ULTJ	2014	15
	2015	17
UNVR	2014	6
	2015	6
WTON	2014	8
	2015	5

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

Lampiran 6 – Pengungkapan Tugas Komite Audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Tugas & Tanggung Jawab

Fungsi utama Komite Audit adalah mendorong ditetapkannya GCG melalui pembentukan struktur pengendalian internal yang memadai. Selain itu, Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris demi membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, yang mana pertanggungjawaban ini merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit terdiri atas:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Lampiran 7 – Tugas & Tanggung Jawab Unit Audit Internal PT Akasha Wira International Tbk

Tugas & tanggung jawab unit Audit Internal berdasarkan Piagam (*Charter*) unit Audit Internal:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
- i. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sumber: Laporan Tahunan PT Akasha Wira International Tbk tahun 2014

Lampiran 8 – Tabel Durbin-Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672

Sumber: dinus.ac.id


Lampiran 9 – Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171


Sumber: ledhyane.lecture.ub.ac.id

Lampiran 10 – Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung K, Jalan Raya Gunung Mula, Jakarta 13220
Telepon (021) 6722274762325, Fax (021) 4762325
Laman: www.unj.ac.id



















INDONESIAN ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS
CERTIFIED ACCOUNTANTS
INDONESIA

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diandra Putri Setiani
No Registrasi : 8535132481
Program Studi : S1 Akuntansi
Dosen Pembimbing I : Mawati Yanti NIP. 9190630 200901 2 001
Dosen Pembimbing II : Adun Zakaria NIP. 19150421 200501 1 001

6. Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kelembikan Instusional dan Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1	9 / 2 / 2017	Konsultasi Judul	Tambahkan 1 variabel X Cara cara baru menguji Y. Lanjutan Latar Belakang Mantapkan Research Gap		
2	2 / 3 / 2017	Konsultasi Judul			
3	5 / 3 / 2017	Konsultasi Judul			
4	13 / 3 / 2017	KONSULTASI Judul			
5	15 / 3 / 2017	Revisi Bab 1 & 2			
6					
7					
8	16 / 3 / 2017	Revisi Bab 1 & 2			
9					
10	16 / 3 / 2017	Revisi Bab 3			
11	17 / 3 / 2017	Revisi Bab 3			
12					
13					
14					

SETUJUU UNTUK UJIAN SKRIPSI

catatan :
- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13120
 Telepon (021) 471227/470628, Faks (021) 470628
 E-mail: www.fe.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED
 CERTIFICATE NO
 14515/2009

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Diondra Ruri Sakti**
 No. Registrasi : **8335192481**
 Program Studi : **Sl. Akuntansi**
 Dosen Pembimbing I : **Mangsiwa Nivanto, NIP. 19750620.200501.2001**
 Dosen Pembimbing II : **Adam Zakaria, NIP. 19750421.200901.1001**

6. Judul Skripsi : **Pengaruh kualitas Komite audit, kepatuhan institusi, dan independensi auditor terhadap pengungkapan pengendalian internal**

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1	19 / 6 / 2017	Konsultasi hasil Penelitian	- Gunakan beberapa metode untuk data		
2	20 / 6 / 2017	Konsultasi hasil Penelitian	- Perbaiki sistematika Penulisan pada sub-bab Pembahasan		
3	3 / 7 / 2017	Bab 4	- Tambahkan implikasi untuk pemertahan & keseluruhan manufaktur		
4		Bab 4 & Bab 5	- Perbaiki sistematika penulisan Uji F		
5	5 / 7 / 2017	Bab 4 & Bab 5	- Perbaiki penulisan kesimpulan		
6		Revisi Bab 4 & Bab 5	- Perbaiki penulisan saran		
7	5 / 7 / 2017				
8					
9					
10	6 / 7 / 2017	Revisi Bab 4 & Bab 5			
11					
12					
13					
14					

SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI

catatan :
 - Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
 - Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Diandra Putri Setiani, lahir di Kendal, 20 November 1994.

Anak pertama dari dua bersaudara. Merupakan anak perempuan dari pasangan Iwan Setiawan dan Sri Romdhonah dan memiliki satu adik laki-laki. Bertempat tinggal di Jalan Palbatu1 No.36 RT02/04, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Menempuh pendidikan formal di SDN Bugangin Kendal dan lulus pada 2007. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang menengah di SMPN 145 Jakarta dan lulus pada tahun 2010. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAN 37 Jakarta pada tahun 2013.

Penulis merupakan mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013. Pada Juli 2017, Penulis menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal”.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi antara lain menjadi Staff Divisi Kaderisasi HMJ Akuntansi pada 2014-2015, Wakil Kepala Divisi Humas dan Teknologi HMJ Akuntansi 2015-2016, Wakil Kepala Departemen *Public Relation* BEM FE UNJ 2016-2017, dan Staff Departemen Komunikasi dan Informasi BEM UNJ pada 2017-2018. Selain itu, penulis juga telah mengikuti

kegiatan KKL yang dilaksanakan di Malaysia pada 2015, KKN yang dilaksanakan di Labuan pada 2016, serta PKL yang dilaksanakan di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata RI pada periode Juli - September 2016.